

# REVIU INDIKATOR KINERJA URTAMA TAHUN 2022 PENGADILAN NEGERI SEMARAPURA



## PENGADILAN NEGERI SEMARAPURA

Jl. Gajah Mada no 59 Semarang Telp. 061-6214214 Fax. 036621350

Website : [pn-semarapura.go.id](http://pn-semarapura.go.id) e-mail : [pn-srp@pn-semarapura.go.id](mailto:pn-srp@pn-semarapura.go.id)

Klungkung - Baw. 80711





## PENGADILAN NEGERI SEMARAPURA

Jl. Gajah Mada Nomor 59, Telp. (0366) 21003, 21424, Fax : (0366) 24350

Semarapura 80711

## KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SEMARAPURA

NOMOR : W24-U3/ 106 /KP.01.2/1/2022

## TENTANG

PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
PENGADILAN NEGERI SEMARAPURA

## KETUA PENGADILAN NEGERI SEMARAPURA

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
  - b. Bahwa dengan berakhirnya masa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2010 - 2014, dan dimulainya Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2015 - 2019 maka Pengadilan Negeri Semarang perlu meninjau kembali atau melakukan reviu untuk penyempurnaan Indikator Kinerja Utama (IKU).
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
  2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
  3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
  4. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi;
  5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025;
  6. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
  7. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung;
  8. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung;
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2015 tentang tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan di Pengadilan;

10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9 M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SEMARAPURA TENTANG PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PADA PENGADILAN NEGERI SEMARAPURA
- Pertama : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Negeri Semarang, untuk menetapkan Renstra, Rencana Kinerja Tahunan, penetapan Perjanjian Kinerja dan menyusun Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen reviu Rencana Strategis Pengadilan Negeri Semarang 2015 - 2019;
- Kedua : Bahwa dalam melakukan Reviu Indikator Kinerja Utama bertujuan untuk lebih menyelaraskan isu - isu strategis di Pengadilan Negeri Semarang agar tetap memiliki indikator kinerja yang valid dan dapat dipergunakan untuk mengukur kinerja dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang  
Pada tanggal 18 Januari 2022

KETUA PENGADILAN NEGERI SEMARAPURA

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretaris Pengadilan Negeri Semarang

PUTU ENDRU SONATA



Desak Ketut Metriani

**REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA  
PENGADILAN NEGERI SEMARAPURA**

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan	<p style="text-align: center;">           Jumlah Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan _____            Jumlah Sisa Perkara Perdata yang Harus Diselesaikan _____            100%         </p> <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sisa perkara Perdata adalah perkara perdata yang belum selesai pada tahun sebelumnya. input adalah jumlah sisa perkara perdata tahun sebelumnya yang harus diselesaikan pada tahun berjalan. output adalah jumlah sisa perkara perdata yang diselesaikan pada tahun berjalan. SE KMA nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan.</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		Persentase Sisa Perkara Pidana yang Diselesaikan	<p style="text-align: center;">           Jumlah sisa perkara pidana yang diselesaikan _____            Jumlah Sisa Perkara Pidana yang harus diselesaikan _____            100%         </p> <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sisa perkara pidana adalah perkara pidana yang belum selesai pada tahun sebelumnya. Input adalah jumlah sisa perkara pidana tahun sebelumnya yang harus diselesaikan pada tahun berjalan. Output adalah jumlah sisa perkara pidana yang diselesaikan pada bulan berjalan. SE</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			KMA nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan.		
	Persentase penurunan sisa perkara: - Perdata - Pidana		$\frac{Tn.1 - Tn}{Tn.1}$ <p><b>Catatan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tn = Sisa perkara tahun berjalan</li> <li>• Tn.1 = Sisa perkara tahun sebelumnya</li> </ul> <p>Sisa Perkara adalah Perkara yang belum diputus pada tahun berjalan</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
	Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu		$\frac{\text{Jumlah Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Perkara Perdata yang Diselesaikan}} \quad 100\%$ <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Input adalah jumlah perkara perdata yang diselesaikan pada bulan berjalan. Output adalah jumlah perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan.</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
	Persentase perkara pidana yang		$\frac{\text{Jumlah Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Perkara Pidana yang Diselesaikan}} \quad 100\%$ <p><b>Catatan :</b></p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			<ul style="list-style-type: none"> <li>Input adalah jumlah perkara pidana yang diselesaikan pada bulan berjalan. output adalah jumlah perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan. Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan.</li> </ul>		
diselesaikan tepat waktu			<p> <math display="block">\frac{\text{Jumlah Perkara Diputus yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding}}{\text{Jumlah Perkara Diputus}} \quad 100\%</math> </p> <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Merupakan persentase jumlah perkara yang diputus dan tidak mengajukan upaya hukum banding. Input adalah jumlah perkara yang putus dalam jangka waktu triwulanan . Output adalah jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dalam jangka waktu triwulanan. Data pada indikator ini diinput dalam jangka waktu triwulan.</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding			<p> <math display="block">\frac{\text{Jumlah Perkara Yang Tidak Diajukan Hukum Kasasi}}{\text{Jumlah Perkara yang Diputus pada tahun berjalan}} \quad 100\%</math> </p> <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li></li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
Persentase perkara yang Tidak Mengajukan			<p> <math display="block">\frac{\text{ersentase Perkara yang Diputus yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali}}{\text{Jumlah Perkara yang Telah Diputus}} \quad 100\%</math> </p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		Upaya Hukum Peninjauan Kembali	<p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Merupakan persentase jumlah perkara yang diputus dan tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali. Input adalah jumlah perkara yang putus pada tahun berjalan. Output adalah jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali pada tahun berjalan. Data pada indikator ini diinput dalam jangka waktu tahunan.</li> </ul>		
		Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	<p>Jumlah Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi _____</p> <p>Jumlah Perkara Pidana Anak _____</p> <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>100%</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		Index Kepuasan Pencari Keadilan	<p>Jumlah Responden Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan _____</p> <p>Jumlah Responden Pencari Keadilan _____</p> <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata	<p>Jumlah Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu _____</p> <p>Jumlah Perkara Perdata yang Diputus _____</p> <p>100%</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan



Penyelesaian Perkara	yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	<p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah Salinan putusan yang dikirim kepada para pihak. Surat Edaran Mahkamah Agung No.01 Tahun 2011 tentang perubahan SE MA No. 02 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan</li> </ul> <p>Jumlah Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat waktu _____ 100%</p> <p>Jumlah Perkara Pidana yang Diputus</p> <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah Salinan putusan yang dikirim kepada para pihak. Surat Edaran Mahkamah Agung No.01 Tahun 2011 tentang perubahan SE MA No. 02 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan. - Salinan putusan Perkara Pidana diberikan langsung kepada para Pihak</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	<p>Jumlah Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi _____ 100%</p> <p>Jumlah Perkara yang Dilakukan Mediasi</p> <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu _____ 100%</li> <li>Jumlah Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi dan PK _____</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan	
Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	<p>Jumlah Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang Dimohonkan Banding, Kasasi, _____</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan	



			<p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu</li> </ul>		
		<p>Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus Setelah Putus</p> <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 100%</li> </ul>	<p>Panitera</p>		Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
3.	<p>Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan</p>	<p>Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan</p> <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 100%</li> </ul>	<p>Jumlah Perkara Prodeo yang Diselesaikan</p> <p>Jumlah Perkara Prodeo</p>	<p>Panitera</p>	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		<p>Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan</p> <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 100%</li> </ul>	<p>Jumlah Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan</p> <p>Jumlah Perkara yang Harus Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan</p>	<p>Panitera</p>	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		<p>Persentase Pencari Keadilan Golongan</p> <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 100%</li> </ul>	<p>Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)</p>	<p>Panitera</p>	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	<p>Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu</p> <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> </ul>		
4.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	<p>Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)</p> <p>100%</p> <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• adalah persentase permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti. Input adalah jumlah putusan perkara BHT dan dimohonkan untuk dieksekusi pada bulan berjalan. Output adalah jumlah putusan perkara yang telah dieksekusi pada bulan berjalan. Semakin tinggi persentase permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti maka semakin bagus kinerja pengadilan</li> </ul>	<p>100%</p> <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• adalah persentase permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti. Input adalah jumlah putusan perkara BHT dan dimohonkan untuk dieksekusi pada bulan berjalan. Output adalah jumlah putusan perkara yang telah dieksekusi pada bulan berjalan. Semakin tinggi persentase permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti maka semakin bagus kinerja pengadilan</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

Ketua Pengadilan Negeri Semarang



Putu Endro Sonata, S.H., M.H.  
197704162000121001